

ABSTRAK

Reformasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu tenaga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja. Reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemudiandiikuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan dalam tesis ini: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal yaitu dengan menerapkan masa percobaan pada setiap pekerja yang direkrutnya termasuk pekerja kontrak. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan tidak boleh menerapkan masa percobaan pada perjanjian kerja waktu tertentu dan apabila tetap dilakukan maka perjanjian kerja tersebut menjadi batal demi hukum. (2) Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikaryawandalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bagi karyawan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal, terdapat pengawas dalam struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kendal serta Lembaga Kerja Sama Tripartit yang (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, selain itu Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan bagi para pekerja/karyawan.

Saran dan penelitian ini adalah : Sebaiknya upah yang diberikan kepada pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) lebih ditingkatkan atau disesuaikan dalam bentuk semacam upah minimum bagi pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi perlindungan bagi mereka, karena belum tentu akan diperpanjang kontraknya atau mendapatkan pekerjaan lagi dalam waktu dekat apabila mereka di berhentikan (PHK). Dengan meningkatkan upah mereka diharapkan kesejahteraan mereka juga semakin meningkat

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Tenaga Kontrak, Badan pertanahan Nasional*

ABSTRACT

Reforms in the field of labor law are conducted with the aim of improving and improving the quality of labor and labor welfare. Reform in the field of labor law begins with the issuance of Law No. 21 of 2000 on Trade Unions. Then followed by the issuance of Law Number 13 Year 2003 on Manpower.

Problems in this thesis: (1) To know and analyze the Implementation of Working Agreement of Certain Time (PKWT) At National Land Agency of Kendal Regency. (2) To know and analyze the form of legal protection for the workers at the National Land Agency of Kendal Regency with the Working Agreement of Certain Time (PKWT).

The results of this research are: (1) Implementation of Specific Time Working Agreement (PKWT) at the Land Office of Kendal Regency by applying a trial period to every worker recruited including contract workers. Which is not in accordance with the provisions of Article 58 of Law Number 13 Year 2003 which requires that no probation be imposed on a specified period of employment and if it is still in place, the work agreement becomes null and void. (2) Legal protection of workers in the Working Covenant of Particular Time (PKWT) is not executed in an optimal manner, since there are still frequent violations, due to unclear rules on the application of Specific Time Working Agreements, in particular with respect to certain occupations which by type and the nature or work shall be completed within a specified period of time, that is, a once completed or temporary work, work that is expected to be completed in a not too distant and 3 (three) year period, in providing legal protection to the workforce of the employees at the Land Office Kendal District, there are supervisors within the structure of the Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans) of Kendal Regency and Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartit) which is a forum for communication, consultation and deliberation on labor matters, in addition the Labor Law has provide protection for workers / employees.

Suggestions and research are: It is better that wages given to workers / laborers with a certain time labor agreement system (PKWT) are further enhanced or adjusted in the form of a kind of minimum wage for workers / laborers with a certain time labor agreement (PKWT) for the protection of them, because it will not necessarily be extended their contract or get a job again in the near future if they are terminated (PHK). By increasing their wages they are expected to increase their welfare

Keywords: Legal Protection, Contract Workers, National Land Agency